

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan ekonomi merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia guna mengaktualisasikan setiap individu untuk meraih tujuan hidupnya. Begitupun bagi negara, Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea keempat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi itu sendiri terdiri dari kesejahteraan individu, masyarakat, serta negara. Dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maka ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan yaitu tercukupinya kebutuhan dasar yang mencakup makan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan). Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, maka orang tersebut akan terjebak kedalam lingkaran kemiskinan yang nantinya tidak dapat mewujudkan kesejahteraan hidup (Firdaus et al., 2023).

Kemiskinan merupakan salah satu inti permasalahan pembangunan sekaligus menjadi salah satu tolak ukur suatu negara, tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana kondisi kemiskinan dan kesejahteraan negara tersebut. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk melanjutkan kehidupan yang dimilikinya, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, sehingga perlu untuk segera ditangani oleh pemerintah. Menurut Todaro (2000), salah satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah sampai seberapa jauhkah ketimpangan pendapatan yang ada di negara-negara Dunia Ketiga dan sejauh manakah hubungannya dengan kemiskinan absolut yang ada di negara-negara itu? (Kuncoro, 2008).

Di negara Indonesia sendiri, kemiskinan juga termasuk salah satu persoalan mendasar sehingga menjadi perhatian utama guna mendukung pembangunan ekonomi negara. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk miskin yang masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun

2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 24,79 juta jiwa. Pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 27,55 juta jiwa di mana angka tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 26,50 juta jiwa dikarenakan Indonesia dalam tahap pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali menurun pada angka 26,36 juta jiwa dan menjadi 25,9 juta jiwa pada periode Maret 2023.

Dengan jumlah penduduk yang padat dan jumlah penduduk miskin yang tergolong cukup tinggi, maka pemerintah Indonesia berusaha melakukan upaya pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian penulis dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi adalah Kota Jambi.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Ribuan Jiwa), Tahun 2019 – 2023

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Jambi (Ribuan Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kerinci	17	17,48	18,45	18,2	18,21
Merangin	32,88	33,92	35,44	34,14	35,19
Sarolangun	25,39	25,79	27,06	26,23	26,77
Batanghari	26,53	26,54	27,24	26,24	25,88
Muaro Jambi	16,86	17,3	20,49	20,64	20,83
Tanjung Jabung Timur	25,35	24,23	24,42	23,42	23,33
Tanjung Jabung Barat	35,12	34,78	36,1	33,95	33,61
Tebo	22,83	22,47	23,77	22,81	23,47
Bungo	20,87	22,07	23,64	20,69	20,65
Kota Jambi	48,95	50,44	54,23	50,4	50,09
Kota Sungai Penuh	2,55	2,78	3,03	2,64	2,66
Provinsi Jambi	274,32	277,8	293,86	279,37	280,68

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret (Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2024)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2023, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kota Jambi yaitu sebanyak 50,09 ribu jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi yaitu 280,68 ribu jiwa. Sementara Kota Sungai Penuh berada di urutan terakhir dengan jumlah penduduk miskin terendah sebanyak 2,66 ribu jiwa. Meskipun sejak tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi terus mengalami penurunan, namun hal ini tidak mengurangi perhatian pemerintah untuk tetap melakukan berbagai upaya guna menurunkan angka kemiskinan di Kota Jambi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemenuhan hak dasar penduduk seperti pemenuhan atas pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih, dan sanitasi serta hak pemenuhan atas perumahan (Putra & Yana, 2007). Perumahan yang merupakan salah satu komponen dalam upaya penanggulangan kemiskinan tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah, LSM, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan secara umum perumahan atau tempat tinggal yang dibangun oleh masyarakat miskin dilakukan secara swadaya dalam artian bahwa pembangunannya bisa dikatakan sebagai bentuk arsitektur tanpa arsitek. Banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan atas perumahan ini, seperti lahan, pembiayaan terkait dengan regulasi, dan prosedur perizinan.

Rumah menjadi kebutuhan dasar sekaligus primer yang harus dimiliki sebagai nilai strategis kehidupan penghuninya di mana juga dijadikan prioritas bagi masyarakat desa maupun kota. Bagi kebanyakan masyarakat desa membangun rumah bukanlah suatu prioritas, hanya dibangun secara sederhana dan tidak memerhatikan dari segi aspek kesehatan sehingga dapat dikatakan tidak layak huni. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa setiap manusia berhak untuk sejahtera baik secara lahir maupun batin, dan memiliki hunian serta lingkungan yang layak huni (Fernanda et al., 2023).

Perumahan layak huni adalah salah satu aspek penting yang harus terpenuhi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak penduduk di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga hal ini sering kali berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Rumah tidak layak huni tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik pula bagi penghuninya mulai dari dampak terhadap kesehatan, kenyamanan, tumbuh kembang, serta produktifitas penghuni. Di Indonesia, per tanggal 15 Juni 2023, jumlah rumah yang tergolong tidak layak huni mencapai 3.654.400 unit. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri masih cukup banyak penduduk yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) dan harus mendapatkan perhatian lebih terutama dari pemerintah (Zayani et al., 2023). Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pihak yang berkaitan lainnya akan pentingnya rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna menurunkan angka kemiskinan.

Pemerintah Indonesia kini telah menyadari pentingnya akses masyarakat miskin terhadap perumahan layak huni. Hal ini terlihat dari diluncurkannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diatur dalam PERMEN PUPR Nomor 07/PRT/M Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program BSPS ini merupakan salah satu program yang dinaungi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan dan telah berjalan sejak tahun 2015 hingga sekarang sekaligus sebagai salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tujuan agar dapat memiliki hunian yang layak dan memadai serta dapat meningkatkan taraf hidup dengan prinsip kegotong-royongan (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2018).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berperan penting dalam menyediakan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah kepada

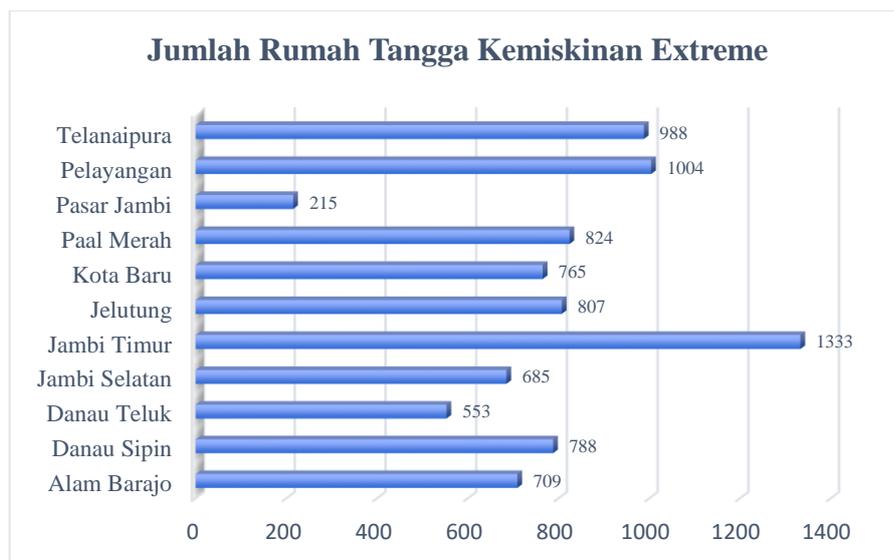
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna membangun, memperbaiki, ataupun memperluas hunian penerima bantuan dari yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Bantuan yang diberikan pada program ini dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan (PB) untuk berbagai keperluan seperti pembelian material/bahan bangunan, upah tukang, renovasi atau pembangunan rumah baru yang layak. Total jumlah dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah pada Program BSPS ini adalah sebesar Rp 20.000.000,- dengan pembagiannya sebesar Rp 17.500.000,- untuk pembelian material bangunan dan Rp 2.500.000,- untuk upah tukang.

Program ini juga berfungsi sebagai stimulus perekonomian di tingkat masyarakat miskin. Dengan penyaluran bantuan oleh pemerintah kepada para penerima bantuan (PB) untuk memperbaiki atau membangun rumah, program ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas lagi sehingga meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, melalui program ini pemerintah berupaya menciptakan lingkungan perumahan yang layak bagi masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, tentram, sehat, dan tentunya nyaman sehingga dapat diperoleh stabilitas dan kepastian tempat tinggal. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pemenuhan rumah layak huni, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek perekonomian, penurunan angka kemiskinan, serta secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis dan sosial.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program yang mempunyai sifat stimulan ini juga tentunya mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk melibatkan diri dalam setiap tahapan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan rumah. Selain itu, program ini mendorong penguatan kapasitas dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri yang kemudian akan berpotensi pada peningkatan kemandirian dan rasa memiliki masyarakat penerima bantuan (PB) terhadap

tinggal, serta tentunya juga akan mempererat ikatan sosial antarwarga dalam komunitas wilayah tersebut.

Salah satu wilayah di Indonesia tepatnya di Provinsi Jambi yang mendapat perhatian dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2023 adalah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Wilayah Kecamatan Jambi Timur dikenal sebagai daerah dengan penduduk yang cukup padat. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS hasil Proyeksi Penduduk 2023, di mana pada tahun 2023 Kecamatan Jambi Timur menduduki peringkat ke-4 jumlah penduduk terbanyak dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Jambi setelah Kecamatan Alam Barajo, Paal Merah, dan Kota Baru yang juga diikuti dengan tingkat keterbatasan ekonomi yang signifikan pula, di mana sebagian penduduknya masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



Gambar 1. 1 Jumlah Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim di Kota Jambi, Tahun 2023

Sumber : Data Primer Olahan, Kantor Camat Jambi Timur

Berdasarkan data rekapitan pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Jambi Timur merupakan wilayah yang memiliki jumlah rumah tangga dengan kemiskinan ekstrim terbanyak di Kota Jambi pada tahun 2023, yakni sebanyak 1333 rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan 15,37% dari keseluruhan rumah tangga miskin ekstrim di Kota Jambi, yaitu 8.671 rumah tangga.

Tabel 1. 2 Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim di Kecamatan Jambi Timur, 2023

Jumlah Rumah Tangga Kemiskinan Extreme					
Budiman	126	Rajawali	90	Talang Banjar	285
Kasang	230	Sijenjang	140	Tanjung Pinang	163
Kasang Jaya	41	Sulanjana	108	Tanjung Sari	150

Sumber : Data Olahan, Kantor Camat Jambi Timur

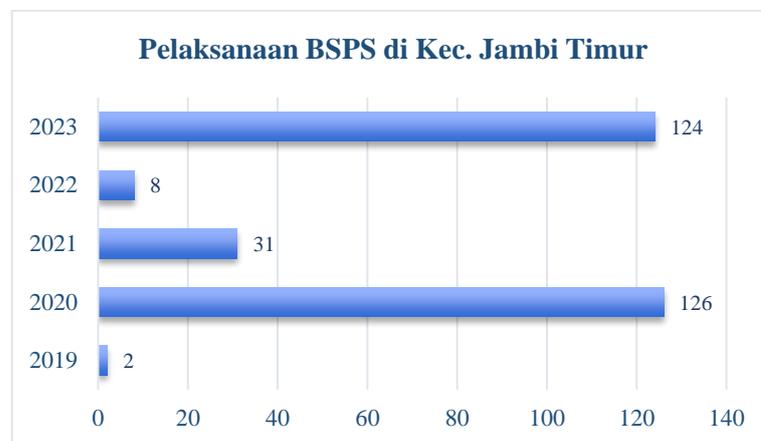
Kecamatan Jambi Timur ini memiliki total 192 RT (Rukun Tetangga), di mana jumlah rukun tetangga dan rumah tangga terbanyak terdapat di Kelurahan Talang Banjar dengan jumlah 35 RT dan paling sedikit di Kelurahan Sijenjang dengan jumlah 10 RT (BPS Kota Jambi, 2024). Berdasarkan data pada tabel 1.2, terlihat bahwa pada tahun 2023 di Kelurahan Sijenjang sendiri terdapat 140 rumah tangga dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Dari banyaknya rumah tangga miskin tersebut, terdapat 89 rumah dengan kondisi tidak layak huni, di mana sebanyak 71 rumah telah mendapatkan bantuan bedah rumah. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran program BSPS dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

Tabel 1. 3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
Alam Barajo	12.895	12.677	218
Danau Sipin	8.729	8.115	614
Danau Teluk	2.557	1.586	971
Jambi Selatan	9.395	8.993	402
Jambi Timur	13.552	12.566	986
Jelutung	15.103	14.856	247
Kota Baru	35.564	35.324	240
Paal Merah	39.980	39.497	483
Pasar Jambi	3.488	3.413	75
Pelayangan	3.073	2.169	904
Telanaipura	12.990	12.580	410
Jumlah	157.326	151.776	5.550

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

Pada Tabel 1.3 menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Jambi Timur, yaitu sebanyak 986 RTLH. Hal ini berarti menunjukkan masih kurangnya perhatian serta pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Kecamatan Jambi Timur. Wilayah lainnya yang juga memiliki rumah tidak layak huni yang cukup banyak terdapat di Kecamatan Danau Teluk sebanyak 971 RTLH dan Pelayangan sebanyak 904 RTLH. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, diperoleh data pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Jambi Timur pada tahun 2019 – 2023.



Gambar 1. 2 Data Pelaksanaan BSPS Di Kecamatan Jambi Timur, Tahun 2019 – 2023

Sumber : Data Primer Olahan, Kantor Camat Jambi Timur

Hingga saat ini belum cukup banyak penelitian yang secara khusus membahas dan mengungkapkan efektivitas dan kontribusi program BSPS ini terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga terutama di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Oleh karena itu, dengan didasari paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga pada Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana karakteristik penerima bantuan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi tahun 2023?
2. Bagaimana implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pada Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini.

1. Menganalisis karakteristik penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi tahun 2023.
2. Menganalisis implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pada Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis

Manfaat penelitian ini dari segi akademis adalah dapat mengetahui gambaran dan karakteristik dari masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Melalui penelitian ini dengan menganalisis peran dan dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2023 diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang efektivitas program bantuan ini dalam memberikan manfaat nyata bagi penduduk miskin terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kelurahan maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa digunakan sebagai media informasi ataupun dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi berbagai pihak seperti pemerintah daerah terkhusus bagi PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna memperbaiki akses perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dan daerah sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tingkat desa/kelurahan, termasuk berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini, maka dapat diidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program ini di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan program perumahan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.